



Dana Pilkada 2017 Rawan Pelanggaran

★ Alokasi dan Pembiayaan Beda Tahun

Pihak Pemkab menyebut, akan sulit mempertanggungjawabkan, kalau penggunaan dana Pilkada yang dikalkulasi mencapai Rp 70 miliar itu itu dipakai dua kali anggaran.

SINGARAJA, NusaBali

Usulan kebutuhan dana pelaksanaan Pilkada Buleleng tahun 2017 mencapai Rp 70 miliar lebih, kemungkinan besar akan dirancang bertahap dalam tiga

kali anggaran. Selain meringankan APBD, ada kekhawatiran pengalokasian dalam setahun yakni di tahun 2016 justru timbulkan pelanggaran.

Masalahnya, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017, yang tidak mungkin ditanggung oleh APBD di tahun 2016. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng Dewa Ketut Puspaka menyebut, akan sulit mempertanggungjawabkan, kalau penggunaan dananya itu sekali justru dipakai dalam dua kali anggaran.

"Contoh anggaran untuk logistik yang mana pemakaiannya 2017, ini akan berpotensi timbulkan pelanggaran kalau harus dialokasikan di tahun 2016. Ada baiknya kebutuhan di tahun 2016 dibiayai di tahun 2016, demikian

juga dengan kebutuhan di tahun 2017," terang Puspaka usai mengadakan rapat tertutup dengan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng, Selasa (13/10) di gedung DPRD Buleleng.

Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna. Sekkab Puspaka menyebut, usulan kebutuhan dana Pilkada itu akan dialokasikan secara bertahap dalam tiga kali anggaran, mulai APBD Induk tahun 2016, kemudian di APBD Perubahan tahun 2016 dan terakhir di APBD Induk tahun 2017. "Soal berapa besarnya, kami akan kaji dan hitung kembali," katanya.

Bupati Buleleng Putu Agus

Suradnyana juga mengakui, usulan kebutuhan dana Pilkada cukup tinggi sehingga bila dialokasikan dalam satu tahun anggaran, dapat mengganggu program pemerintah yang telah direncanakan sejak awal, seperti perbaikan infrastruktur jalan pedesaan dan perkotaan.

"Ini tidak main-main anggarannya, kalau ini semua masuk di APBD Induk tahun 2016, dari mana kami mencari dana untuk mengaspal jalan dan membangun sarana fisik yang sudah diprogram sejak awal," tegasnya.

Menurut Bupati, pihaknya akan mengkaji matang usulan kebutuhan dana Pilkada tersebut dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada. Kemungkinan besar, akan ada rasionalisasi terhadap usulan kebutuhan dana

Pilkada tersebut. "Pasti akan ada rasionalisasi dan kita masih melakukan kajian sebelum kita tetapkan dalam KUA dan PPAS," imbuh Bupati murah senyum ini.

Sebelumnya, KPU sendiri kurang setuju kalau kebutuhan dana Pilkada yang diusulkan dialokasikan secara bertahap. Masalahnya, kebutuhan anggaran yang diusulkan sudah dalam satu paket.

KPU menyatakan, pertengahan tahun 2016 sudah harus memiliki anggaran, karena tahapan Pilkada sudah dimulai. KPU khawatir, kalau kebutuhan dana itu dianggarkan bertahap, justru pemerintah daerah belum bisa merealisasikan dana pada saat dibutuhkan. Karena APBD Induk baru bisa direalisasikan paling lambat bulan Maret ditahun bersang-kutan. **k19**



Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Gianyar

Pelimpahan Tahap II Belum Ada Kejelasan

DENPASAR, NusaBali

Setelah batal dilimpahkan pada, Senin (11/10) lalu, hingga saat ini belum ada jadwal pasti pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Pemkab Gianyar yang menyeret 14 orang sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hery Wiyanto mengatakan untuk pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Gianyar, yaitu pelimpahan barang bukti dan tersangka dari Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali masih menunggu hasil koordinasi penyidik.

"Sampai sekarang belum ada jadwal kapan kasus ini akan dilimpahkan. Tapi dipastikan dalam waktu dekat," tegas Kombes Hery yang dihubungi pada, Rabu (14/10). Ia mengatakan dalam pelimpahan tahap II yang batal dilaksanakan Senin lalu, penyidik mendapatkan beberapa kendala. Di antaranya beberapa tersangka yang tidak bisa dilimpahkan dengan beberapa alasan.

"Semua tersangka (14 orang, red) harus semuanya dilimpahkan secara bersamaan. Kalau ada satu atau dua tersangka berhalangan ya tidak bisa dilimpahkan dan harus menunggu klop 14 tersangka," ujarnya. Hal yang sama dikatakan Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan. Ia mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan soal pelimpahan tahap II yang batal dilakukan, Senin lalu. Namun untuk jadwal ulang pelimpahan hingga saat ini belum ada.

"Kami masih menunggu dari Polda," jelas Ashari. Kasus perjalanan dinas fiktif ini berawal saat Pemkab Gianyar melakukan studi banding ke Pemerintahan Kota Depok. Namun kenyataannya, empat tersangka malah diketahui *melali* ke Thailand dan sisanya ke Jakarta dan Bogor. Akibat perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian Rp 94 juta lebih.

14 tersangka yang dirilis Kejati Bali masing-masing Dewa Made Putra jabatannya Sekretaris Camat Tampaksiring, Ketut Ritama Kepala Seksi Tramtib Ubud, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, Staf Camat Tampaksiring, Ni Ketut Juniantari Staf Dinas Perhubungan, I Ketut Puja Staf Camat Tegallalang, I Made Darmaja Staf Camat Gianyar, Komang Yastara Staf Camat Gianyar, I Made Wirawan PNS Pendam, I Nyoman Sulandra Staf Camat Ubud, Ni Wayan Sucasih jabatan PNS Pemkab Gianyar, Ni Ketut Suniawati jabatan Staf Bagian Hukum Pemkab Gianyar, Ni Made Ayu Purniasih staf Pemkab Gianyar, AA Istri Agung Yunariawati PNS Camat Gianyar dan I Made Suparta PNS Dinas Pendapatan Gianyar. **rez**

Edisi : Kamis, 18 Oktober 2015

Hal : 15



Pemprov Bali Kembali Disodok Penipuan

★ Dewan Nilai Kurang Cegah Dini

Salah satu rekanan yang ikut tender menjadi korbannya, karena telah mengirimkan sejumlah uang kepada si penipu yang telah menjanjikannya sebagai pemenang.

DENPASAR, NusaBali

Setelah program unggulannya, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Kali ini, Pemprov Bali kembali disodok kasus penipuan dengan modus pengadaan barang dan jasa (lelang pengadaan barang) yang mengatasnainya. Layanan Pengadaan (ULP).

Pemprov Bali pun kelimpungan dengan kasus penipuan tersebut, sehingga Plt Kepala Biro Humas Pemprov Bali, Ketut Teneng, Selasa (13/10) sampai harus mengeluarkan imbauan kepada para rekanan pengadaan barang dan jasa yang menyediakan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov Bali mewaspada aksi penipuan oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan mengatasnamakan ULP. Penipuan yang berjanji bisa memuluskan jalan sebagai pemenang lelang dengan syarat meminta sejumlah uang sebagai imbalan, kini sedang diusut.

Diungkapkan Teneng, modus yang dilakukan pelaku ini menyasar para rekanan pengadaan



Ketut Teneng

barang dan jasa yang ikut serta dalam proses pelelangan paket pekerjaan di Pemprov Bali. Salah satu yang telah menjadi korban modus penipuan itu adalah rekanan peserta dalam pelelangan paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sound System di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kan-

tor Biro Aset Setda Provinsi Bali, saat ini sudah sampai pada tahap pembuktian kualifikasi penyedia sebagai calon pemenang lelang.

Tahap tersebut, menurut Teneng, dimanfaatkan oleh pelaku dengan mengirimkan undangan pembuktian sebagai calon pemenang via-email. "Seperti yang dialami penyedia atas nama CV Sabda Sentosa Abadi yang mendapatkan undangan via-email menyatakan perusahaannya sebagai calon pemenang nomor urut 3. Pi-

hak rekanan tersebut langsung menghubungi contact person yang tertera dalam undangan. Oleh pelaku diyakinkan akan menjadi pemenang lelang apabila mentransfer sejumlah uang. Permintaan itu pun dituruti CV Sabda Sentosa Abadi dengan mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh pelaku," ungkap Teneng.

Ditegaskan Teneng, undangan dari pihak ULP bagi para penyedia barang dan jasa yang akan melakukan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui faximili (via fax kantor ULP : 0361-243576), dan bukan via-email. "Tidak ada biaya yang dipungut bagi pemenang lelang, asalkan semua persyaratan dalam sistem pelelangan sudah terpenuhi," ujar birokrat yang juga Kepala Inspektorat Pemprov Bali ini.

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 3



Sambungan - - -

Guna mencegah bertambahnya korban, Teneng menghimbau para penyedia barang dan jasa dan tidak gampang percaya terhadap jalan pintas yang ditawarkan dalam proses pelelangan. Lebih dari itu, rekanan juga diingatkan agar tidak meladeni jika ada oknum yang menghubungi dengan membawa nama pimpinan. "Apabila menemui hal-hal yang mencurigakan seperti tersebut diatas, para penyedia diharapkan langsung menghubungi ULP di nomor telp. 0361-243576 atau sms centre Pemprov Bali 08113881875, agar bisa lebih jelas dalam mendapatkan informasi" pinta Teneng.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali yang membidangi Perizinan dan Perundang-undangan, I Ketut Tama Tenaya secara terpisah mengatakan, kasus penipuan sebelumnya sudah terjadi dengan mencatut program JKBM. Kemudian sekarang lagi terjadi penipuan dan masyarakat jadi korban. "Harusnya ada cegah dini, sosialisasi oleh lembaga itu sendiri. ULP misalnya, harusnya sejak awal sosialisasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa itu," kata Tama Tenaya.

Namun demikian menurut Tama Tenaya, kasus penipuan yang terjadi di Pemprov Bali dengan modus macam-macam dan berbagai cara itu agar

tidak ditelan mentah-mentah, apalagi ada perusahaan juga mau mengirimkan uang. Padahal sebenarnya ULP tidak ada memungut uang atau biaya. "Jangan-jangan ada juga oknum yang memang bermain. Bagi kami sebagai lembaga kontrol di DPRD Bali, sebaiknya kasus penipuan ini dilaporkan ke penegak hukum, dan usut sampai tuntas. Pemprov Bali sosialisasikan juga program-program secara jelas untuk mencegah penipuan. Masyarakat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya supaya mereka paham. Tidak boleh ada yang ditutupi informasinya," ujar Tama Tenaya, menegaskan.

Sebelumnya, Pemprov Bali juga disodok kasus penipuan dengan mengatasnamakan program unggulannya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Sejumlah sulinggih didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas dari JKBM yang membagikan kartu JKBM palsu dengan meminta sejumlah uang sebagai gantinya. Sang penipu meyakinkan bahwa dengan menggunakan kartu e-JKBM palsu berwarna ungu itu, akan lebih mudah dan cepat mendapat pelayanan saat berobat. Disamping itu pelaku juga mengiming-imingi dengan tambahan asuransi jiwa dengan membayar premi yang harus dibayar tiap bulan. **nat**